

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jimly, Asshiddiqie, 2016, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*”, Jurnal Mahkamah Konstitusi

Bagir, Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH-UII Press

Bambang, Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurdi, Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana

Koentjaraningrat, 1974, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru

Kansil, CST, 1986, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.

Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers

Khairul Fahmi, 2016, *Pemilihan Umum dalam transisi demokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers

Refly, Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press

Sri, Hartini, dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Zainudin, Ali, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negeri dalam Partai Politik

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor B/71/M.SM.00 00/2017 Tentang Etik Aparatur Sipil Negara

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2013-2018

C. Jurnal dan Website

Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, <https://setjen.pu.go.id/bko/news/pns-indisipliner-berikut-tiga-jenis-hukuman-disiplinnya>

Jabatan Pemerintahan, <https://warmadewa.ac.id/index.php/baca-berita/202/Seputar-Jabatan-Struktural-dan-Jabatan-Fungsional-PNS.html>

Kasus Pelanggaran ASN, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/12/17535521/990-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-terkait-pemilu-ini-penjelasan-bkn>

Kasus Pelanggaran ASN di Kota Padang, <https://kumparan.com/langkanid/dugaan-pelanggaran-pemilu-bawaslu-panggil-2-asn-1qtid5q9gnW>

Larangan Kampanye, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/asn-boleh-ikut-kampanye-pemilu-2019-tapi-dengan-syarat-ini/full>

Netralitas Pegawai Negeri Sipil, https://www.academia.edu/7394609/NETRALITAS_PEGAWAI_NEGERI_SIPIL_I._Pengertian_Netralitas_PNS

Media Hukum, 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/277116-none-3c89adb5.pdf>
Pemilihan Umum, https://www.academia.edu/17562645/MAKALAH_PEMILU_Sanksi_Aparatur_Sipil_Negara,

Pelanggaran Apartur Sipil Negara, <https://republika.co.id/berita/qiqtvw428/pelanggaran-di-masa-kampanye-25-asn-di-sumbar-ditindak>